ANALISIS KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN PADA PT SETYANATA BERSAUDARA TAHUN 2018

Fina Mariana dan Punamawati Helen Wijaya

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email : finamariana29@gmail.com

Abstract: *Tax collection is one of the most important things in Indonesia, where mostly come from income tax. This research aims to find out the corporate income tax liability at PT Setyanata Bersaudara in 2018, and its accordance with Act. Taxation Number 36 Year 2008. The research method used is descriptive analysis method. The calculation of tax obligations in this research is divided into several articles of income tax and fiscal corrections are made on the company's income statement. The result of this study indicate that PT Setyanata Bersaudara had calculated, payment, and reported corporate income tax in accordance with Act. Taxation Number 36 Year 2008.*

Keywords: *Calculation, Payment, Reporting, ,Corporate Income Tax, Act. Taxation Number 36 Year 2008.*

Abstrak: Pemungutan pajak merupakan salah satu hal penting di Indonesia yang penerimaannya sebagian besar berasal dari Pajak Penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban PPh Badan pada PT. Setyanata Bersaudara tahun 2018 sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Perhitungan kewajiban perpajakan pada penelitian ini dibagi pada beberapa pasal PPh dan koreksi fiskal dilakukan pada laporan laba rugi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Setyanata Bersaudara melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Badan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Badan, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia sudah berkembang sejak masa sebelum penjajahan kolonial, pemungutan pajak menjadi salah satu hal yang penting bagi negara Indonesia. Pajak disebutkan dalam pasal 23A UUD 1945 merupakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam undang - undang. Keperluan negara yang dimaksud adalah untuk segala kegiatan pembangunan di berbagai bidang contohnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah jalan bebas hambatan (jalan tol), MRT (*Mass Rapid Transit*) dan LRT (*Light Rail Transit*). Dana yang diperlukan oleh pemerintah pun tidak sedikit sehingga mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari dalam negeri khususnya dari sisi penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan merupakan Wajib Pajak yang terbagi menjadi orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak sesuai peraturan perundang - undangan perpajakan.

Wajib Pajak Badan merupakan suatu badan usaha berbentuk perusahaan di dalam negeri yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Sehingga perusahaan yang termasuk sebagai Wajib Pajak tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang didasarkan pada penghasilan tertentu yang diperoleh perusahaan selama satu tahun. Wajib Pajak Badan wajib membuat pembukuan dan menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta melakukan perhitungan pajak penghasilan pada setiap akhir tahun pajak. Perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sejak tahun 1983, peraturan perpajakan mengalami perubahan yaitu dengan mempercayakan Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri (*Self Assessment System*). Penyerahan kepercayaan ini menuntut Wajib Pajak harus memahami ketentuan perpajakan dengan baik karena undang - undang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penegakan hukum dengan mengawasi para Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak maka akan menghadapi sanksi administratif pidana.

Dalam penerapan *Self Assessment System* era sekarang ini, ada kemungkinan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang disebabkan karena ketidaktahuan Wajib Pajak. Sehingga dalam pelaksanaan aktivitas sebuah badan usaha, Wajib Pajak Badan harus mengetahui beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPH) yang dapat dikenakan pada perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPH) yang tertulis pada Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 4 ayat (2). Dalam pasal - pasal tersebut dijelaskan obyek pajak yang menjadi tanggung jawab perpajakan dengan tarif pengenaan yang beragam. Pengakuan penghasilan dan beban menurut aturan perpajakan (fiskal) dengan aturan akuntansi perusahaan (komersial) dapat berbeda. Oleh karena itu, seringkali terjadi perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) antara perusahaan dengan fiskus sehingga perlu dilakukan penyesuaian fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi Wajib Pajak Badan lainnya dalam penerapan *Self Assessment System* agar tidak terjadi kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak yang disebabkan ketidaktahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perundang - undangan perpajakan. Selain itu, karena perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara perusahaan dengan fiskus dapat memengaruhi perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Badan maka perusahaan perlu membuat penyesuaian fiskal untuk mendapatkan besar penghasilan fiskal yang digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Badan.

KAJIAN TEORI

Definisi Perpajakan

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang Undang, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sepenuhnya kemakmuran rakyat. Pendapat lain disampaikan oleh Supryanto (2014), pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari rakyat yaitu Wajib Pajak untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat diserahkan secara langsung, namun pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak langsung terhadap kemakmuran masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Definisi Pajak Penghasilan (PPH)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Pengertian lain disampaikan oleh Resmi (2014), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak.

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Menurut Prisilia (2020) Pajak Penghasilan (PPh) Badan dikenakan pada Wajib Pajak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu subjek pajak dalam negeri yang merupakan badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Definisi Koreksi Fiskal

Menurut Suandy (2011), koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal sendiri menurut Rian (2014) adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar atau metode akuntansi tetapi ketentuannya disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kaitan Antar Variabel

a. Laporan Keuangan dengan Perpajakan

Pajak menjadi salah satu kewajiban bagi Wajib Pajak sehingga setiap kegiatan yang dicatat perusahaan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan harus memastikan penyusunan laporan keuangan mengikuti peraturan perpajakan yang sedang berlaku.

b. Laporan Keuangan dengan Pajak Penghasilan

Penelitian ini menganalisis mengenai kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak Badan dengan melihat transaksi yang dicatat perusahaan dalam laporannya. Transaksi tersebut merupakan obyek pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008.

c. Laporan Keuangan dengan Pajak Penghasilan Badan.

Subyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri karena didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Sehingga perhitungan besar kewajiban pajaknya juga disesuaikan dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

d. Laporan Keuangan dengan Koreksi Fiskal

Dalam menghitung besar Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan yang dibuat secara komersial dengan ketentuan perpajakan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan aturan perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap berbeda. Tahap pertama yaitu perencanaan yang diawali dengan penentuan judul penelitian, variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini, Wajib Pajak Badan yaitu PT. Setyanata Bersaudara merupakan variabel dependen dan Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) merupakan variabel independen.

Tahap kedua adalah pelaksanaan, pada tahap ini data - data yang berhubungan dengan penelitian dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan dari Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal, Koreksi Fiskal Positif dan Negatif, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun 2018, SPT Masa untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan Bukti Setoran Pajak. Kemudian data - data tersebut digunakan untuk menganalisis kewajiban perpajakan PT. Setyanata Bersaudara Tahun 2018.

Tahap ketiga adalah penyelesaian, tahap ini dibuat sebuah kesimpulan berdasarkan data - data yang telah diolah pada dua tahap sebelumnya. Pada tahap ini juga pemberian rekomendasi dilakukan bagi PT. Setyanata Bersaudara sebagai masukan untuk kewajiban perpajakannya perusahaan pada tahun berikutnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis deskriptif. Bentuk penelitian deskriptif sendiri menurut Sugiono (2016) merupakan penelitian yang memberikan deskripsi mengenai data-data yang ada, namun tidak bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan atau gagasan secara umum. Sedangkan analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi, fakta-fakta, serta bukti dari objek yang diteliti yang selanjutnya akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang ada.

Obyek untuk penelitian ini adalah laporan keuangan dari PT. Setyanata Bersaudara pada tahun 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya seperti data hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara seperti Laporan Laba Rugi dan Neraca tahun 2018, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 Ayat (2), Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Bukti Setor berupa Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Laporan berupa *E-Filing*. Lokasi dari penelitian ini adalah PT. Setyanata Bersaudara yang berlokasi Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 110-A , RT 024, Kota Palembang, Sumatera Selatan. PT. Setyanata Bersaudara merupakan perusahaan distributor resmi gas LPG tiga kilogram untuk wilayah Kota Palembang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini terdiri dari dua cara yaitu, (1) Penelitian Lapangan, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian untuk dapat memperoleh data yang lebih rinci dan jelas. Penelitian lapangan terbagi menjadi dua cara yaitu pengamatan (Observasi) yang dilakukan dengan cara peneliti mengamati secara langsung objek yang sedang teliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dan data yang aktual tentang kewajiban perpajakan apa saja yang dikenakan pada PT. Setyanata Bersaudara. Lalu selanjutnya mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Setyanata Bersaudara, dan wawancara yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini yaitu kewajiban perpajakan pada PT. Setyanata Bersaudara, (2) Penelitian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara teoritis dengan cara memperoleh informasi dari beberapa buku, dokumen, dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Contohnya peneliti dapat membaca buku - buku teori pajak, undang - undang perpajakan, serta penelitian terdahulu mengenai kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak Badan.

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu, (1) Melakukan pemeriksaan kembali pada data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti yang berkaitan dengan kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian data PT. Setyanata Bersaudara dengan permasalahan dalam penelitian, (2) Mengolah data dari hasil tahap pertama, dengan cara menyusun data menjadi berkelompok atau mencatat data dalam bentuk tabel untuk mempermudah evaluasi, (3) Memberikan keterangan berupa penjelasan tambahan pada data tertentu sebagai catatan peneliti dalam memahami data yang sedang diolah, (4) Melakukan perhitungan ulang sebagai cara peneliti untuk memeriksa kembali perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Contohnya memeriksa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada laporan keuangan baik sebelum maupun sesudah rekonsiliasi fiskal dan pada Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada PT. Setyanata Bersaudara, (5) Melakukan pemeriksaan ulang pada koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Setyanata Bersaudara, dengan tujuan untuk mengetahui apakah koreksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan peneliti mencari tahu dasar hukumnya dari koreksi fiskal tersebut, (6) Membandingkan hasil perhitungan yang telah dicatat oleh perusahaan dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan tarif dan ketentuan pajak yang berlaku misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan perpajakan lainnya, (7) Memeriksa kesesuaian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan setiap kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada PT. Setyanata Bersaudara dengan ketentuan pajak yang berlaku misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan perpajakan lainnya, (8) Memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini.

HASIL UJI STATISTIK

Tabel 1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Setyanata Bersaudara Tahun 2018
(dalam Rupiah)

No.	Penghasilan Neto Setahun	Status	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 yang Dipotong
1.	34.200.000	TK/0	54.000.000	0	0
2.	34.200.000	TK/0	54.000.000	0	0
3.	34.200.000	TK/0	54.000.000	0	0
4.	34.200.000	TK/0	54.000.000	0	0
5.	34.200.000	K/3	72.000.000	0	0
6.	34.200.000	TK/0	54.000.000	0	0
7.	34.200.000	K/3	72.000.000	0	0
8.	34.200.000	K/3	72.000.000	0	0
9.	34.200.000	K/2	67.500.000	0	0
10.	34.200.000	TK/0	54.000.000	0	0
11.	34.200.000	K/2	67.500.000	0	0
12.	34.200.000	K/2	67.500.000	0	0

Tabel 2. Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. Setyanata Bersaudara Tahun 2018
(dalam Rupiah)

Masa Pajak	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pph 22 yang Dipungut	Tanggal Bukti Pemungutan
Januari	441.382.220	0,3%	1.324.146	31 Januari 2018
Februari	421.909.475	0,3%	1.265.728	28 Februari 2018
Maret	441.382.220	0,3%	1.324.146	31 Maret 2018
April	415.418.560	0,3%	1.246.255	30 April 2018
Mei	460.854.965	0,3%	1.382.564	31 Mei 2018
Juni	454.364.050	0,3%	1.363.092	30 Juni 2018
Juli	395.945.815	0,3%	1.187.837	31 Juli 2018
Agustus	441.382.220	0,3%	1.324.146	31 Agustus 2018.
September	408.927.645	0,3%	1.226.782	30 September 2018
Oktober	441.382.220	0,3%	1.324.146	31 Oktober 2018
November	441.382.220	0,3%	1.324.146	30 November 2018
Desember	421.909.475	0,3%	1.265.728	31 Desember 2018
Total	5.186.241.085		15.558.927	

Tabel 3. Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Setyanata Bersaudara Tahun 2018
(dalam Rupiah)

Masa Pajak	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pph 23 yang Dipotong	Tanggal Bukti Pemotongan
Januari	42.897.255	2%	857.945	16 Januari 2018
Februari	40.514.074	2%	810.281	20 Februari 2018
Maret	38.726.687	2%	774.533	03 April 2018.
April	40.514.074	2%	810.281	24 April 2018
Mei	38.130.893	2%	762.617	22 Mei 2018
Juni	42.301.460	2%	846.029	22 Juni 2018
Juli	38.130.893	2%	762.617	10 Juli 2018
Agustus	38.726.688	2%	774.533	09 Agustus 2018
September	40.514.073	2%	810.281	10 September 2018
Oktober	37.535.098	2 %	750.701	09 Oktober 2018
November	40.514.073	2%	810.281	14 November 2018
Desember	40.514.074	2%	810.281	07 Desember 2018
Total	479.019.342		9.580.380	

Tabel 4. Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 PT. Setyanata Bersaudara Tahun 2018 (dalam Rupiah)

Masa Pajak	Jenis Transaksi	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPh Pasal 4 Ayat (2) yang Dipotong	Tanggal Bukti Pemotongan
November	Dividen	650.000.000	10%	6.500.000	30 November 2018
Desember	Sewa Bangunan	10.000.000	10%	1.000.000	04 Desember 2018
	Dividen	24.000.000	10%	2.400.000	04 Desember 2018
	Jasa Giro	3.025.787	20%	605.157	04 Desember 2018

Tabel 5. Perhitungan Laba Setelah Koreksi Fiskal PT. Setyanata Bersaudara Tahun 2018 (dalam Rupiah)

Labanya Sebelum Pajak		606.912.815,41
Koreksi Fiskal Positif		
- Harga Pokok Penjualan	5.186.241.085,00	
- Biaya Gaji Karyawan	301.200.000,00	
- Biaya Cetak dan Alat Tulis Kantor	1.290.000,00	
- Biaya Keperluan Kantor	28.333.000,00	
- Biaya Ijin, Retribusi, dan Iuran	2.250.500,00	
- Biaya Listrik, Telephone, dan Air	4.200.000,00	
- Biaya Angkut dan Kenek	102.489.000,00	
- Biaya Materai	372.000,00	
- Biaya Rapat, Perjalanan Dinas, dan Jamuan Tamu	13.160.000,00	
- Biaya Administrasi Bank	2.339.500,00	
- Biaya Iklan dan Promosi	848.000,00	
- Biaya Operasional / Dinas	29.326.000,00	
- Biaya Lain – Lain	22.380.000,00	
Jumlah Koreksi Fiskal Positif		
Koreksi Fiskal Negatif		5.694.429.085,00
- Penerimaan Hasil Penjualan LPG 3 Kg	6.194.160.000,00	
- Pendapatan Lainnya	3.025.787,41	
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif		6.197.185.787,41
Labanya Setelah Koreksi Fiskal		104.156.113,00

Perhitungan PPh Badan untuk PT. Setyanata Bersaudara menggunakan tarif dengan fasilitas yang mengikuti aturan dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 31E karena besar peredaran bruto perusahaan di bawah Rp. 50.000.000.000,00 maka PT. Setyanata Bersaudara mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak. Berikut adalah perhitungan PPh terutang pada PT. Setyanata Bersaudara pada Tahun 2018:

Penghasilan Neto Fiskal	Rp. 104.156.113,00
Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp. 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 104.156.113,00
PPh Badan:	
50% x 25% x Rp. 104.156.000,00	= Rp. 13.019.500,00

Dalam Tahun 2018, PT. Setyanata Bersaudara hanya memiliki kredit pajak dalam negeri yaitu PPh Pasal 23 sebesar Rp. 9.580.380,00 dan tidak ada kredit pajak luar negeri. Selain itu selama tahun 2018, perusahaan sudah menyetorkan PPh Pasal 25 sebesar Rp. 3.186.000,00 sehingga perhitungan PPh Terutang pada PT. Setyanata Bersaudara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PPh Badan Tahun 2018	Rp. 13.019.500,00
Kredit Pajak	
- PPh 23	Rp. 9.580.380,00
- PPh 25	Rp. 3.186.000,00
PPh 29 (Kurang Bayar)	Rp. 253.120,00

Beberapa tabel diatas bersumber dari data perpajakan milik PT. Setyanata Bersaudara pada tahun 2018 yang telah diolah kembali atas penyetoran dan pelaporan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 Ayat 2 dan Koreksi Fiskal perusahaan. Untuk tahun 2018, terdapat PPh 29 (Kurang Bayar) sebesar Rp. 253.120,00 dan sudah disetorkan pada 27 Maret 2019. PT. Setyanata Bersaudara melaporkan SPT Tahunan PPh Badan pada 16 April 2019.

DISKUSI

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT. Setyanata Bersaudara telah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Jenis transaksi yang dikenakan, jumlah dasar pengenaan, dan besar tarif telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga PT. Setyanata Bersaudara dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Badan yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang sedang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan perhitungan koreksi fiskal pada PT. Setyanata Bersaudara selama tahun 2018 karena peneliti tidak memperoleh pencatatan penghasilan dan biaya PT. Setyanata Bersaudara secara rinci. Sehingga hasil analisa hanya diperoleh dari hasil wawancara dan laporan keuangan yang langsung membagi penghasilan dan biaya yang masuk dalam obyek pajak dan bukan obyek pajak. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat memperoleh pencatatan penghasilan dan biaya perusahaan secara rinci untuk dapat melakukan perhitungan koreksi fiskal dengan dasar pengelompokkan yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pt. Makmur Auto Mandiri. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 404–411. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21173.2018>.
- Corneles, V. M., Ilat, V., & Tirayoh, V. Z. (n.d.). *ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK ATAS PENEBUSAN LPG 3KG DARI PERTAMINA PADA PT. BERKAT JABES*.
- Erythrina, Orié rahma; Punrawati, H. W. (2020). ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH 21, PPH 23 DAN PPH 4.pdf. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(36), 1258–1265.
- Krisanti, W., & Dewi, D. (2020). Pajak Penghasilan Badan pada PT REDSUN LESTARI TAHUN 2018 *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara. Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(April), 930–935.
- Morasa, J., & Tindagi, R. (2014). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1067–1076. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i2.4487>
- Ryan, Tinangon, J. J., & Inggriani, E. (2014). Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada Pt. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 1101–1111.
- Sejanto, T. W., Elim, I., & Tirayoh, V. Z. (2018). Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Cv. Venus Kumersot Raya. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 464–475. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19644.2018>
- Silalahi, E. M., Nugroho, L., & Anasta, L. (2018). Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1). <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2600>
- Sondakh, S. G. (2015). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., Budiarmo, N., Perhitungan, A., Pelaporan, D. A. N., Pasal, P. P. H., Pph, D. A. N., Pada, P., Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Bisnis, F. (2020). PT MANADO MITRA MANDIRI CALCULATION ANALYSIS AND REPORTING OF PPH ARTICLE 25 AND PPH ARTICLE 29 IN PT MANADO MITRA MANDIRI Oleh : Jurnal EMBA Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 771-780. *Jurnal EMBA*, 8(4), 771–780.
- Walandouw, P. (2013). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 987–997. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1908>